

PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT, PREDIKSI KEBANGKRUTAN DAN KEPEMILIKAN PUBLIK TERHADAP AUDIT REPORT LAG

Inneke Kusuma Ratnasari

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Yanti Ardiati

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: yanti.ardiati@gmail.com

Abstrak

Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan di Indonesia diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Semua Perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunannya. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Indonesia (2003), perusahaan yang terdaftar wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepada BAPEPAM dan Bursa Efek Indonesia (BEI) paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal pernyataan.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh karakteristik komite audit, prediksi kebangkrutan dan efek lag kepemilikan publik atas laporan audit. Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik komite audit dan prediksi kebangkrutan berpengaruh pada audit report lag tetapi kepemilikan publik tidak berpengaruh pada audit report lag.

Kata kunci: *audit report lag, karakteristik komite audit, kepemilikan publik, perusahaan manufaktur, prediksi kebangkrutan.*

Abstract

Submission of Annual Financial Statements in Indonesia organized by the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK). All of the Company that the shares are traded on the Indonesia Stock Exchange (IDX) shall submit the Annual Financial Report. The Indonesian Capital Market Supervisory Agency Rule (2003), listed companies are required to submit the audited annual financial statement to BAPEPAM and Indonesian Stock Exchange (IDX) at the latest at the end of the third month after the date of the statement.

This research was conducted in order to test the effect of the characteristics of the audit committees, predictions of bankruptcy and public ownership lag effect on the audit report. The study was conducted at the manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange in 2010-2014.

The results showed that the characteristics of the audit committee and bankruptcy prediction have effect on audit report lag but public ownership has no effect on audit report lag.

Keywords: *audit committees characteristics, audit report lag, bankruptcy prediction, manufacturing companies, public ownership.*

1. Pendahuluan

Laporan keuangan mempunyai peranan penting dalam penilaian kinerja perusahaan serta bermanfaat dalam pengambilan keputusan (Lianto dan Kusuma, 2010). Laporan keuangan harus disampaikan tepat waktu atau sesegera mungkin untuk menghindari hilangnya relevansi informasi yang terdapat didalamnya, sehingga keputusan-keputusan ekonomi dapat segera diambil (Kadir, 2011). Sebaliknya, apabila informasi tersebut tidak disampaikan dengan tepat waktu akan menyebabkan informasi tersebut kehilangan nilai dan mempengaruhi kualitas keputusan (Midansih dan Wibowo, 2011).

Penyampaian laporan keuangan tahunan di Indonesia diatur secara khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan, atau sebelumnya oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Seluruh perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan secara berkala. Jangka waktu pengumuman laporan keuangan tahunan diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-346/BL/2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. Dinyatakan pada nomor 2 C bahwa laporan keuangan tahunan wajib disampaikan paling lambat pada akhir bulan ketiga (Brian dan Martani, 2014).

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena masih banyaknya perusahaan publik di Indonesia yang menyampaikan laporan keuangan lebih dari batas waktu yang ditentukan oleh OJK yaitu 90 hari setelah tanggal laporan keuangan. Pada tahun 2013 terdapat 52 perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangan yang berakhir per 31 Desember 2012. Pada tahun 2014 terdapat 49 perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2013 dan pada tahun 2015 ada 52 perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2014 (www.idx.co.id).

Banyak faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya perusahaan menyampaikan laporan keuangan. Faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan antara lain karakteristik komite audit, prediksi kebangkrutan dan kepemilikan publik. Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Komite audit bertugas memberikan pendapat kepada dewan komisaris

terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris, dan melaksanakan tugas dewan komisaris antara lain melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya (Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004). Tujuan dibentuknya komite audit yaitu dalam rangka pengelolaan perusahaan yang baik. Terlaksananya pengelolaan perusahaan yang baik maka integritas pelaporan keuangan akan meningkat. Integritas pelaporan ini dapat dilihat dari ketepatan waktu pelaporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan (Purwanti, 2006).

Perusahaan yang diprediksi bangkrut cenderung akan terjadi penundaan pelaporan keuangan. Hal ini dikarenakan auditor memerlukan waktu yang lebih lama dalam proses audit. Auditor memerlukan data tambahan yang diperlukan untuk dapat menghasilkan opini yang sesuai dengan kondisi perusahaan tersebut (Setyahadi, 2012).

Kepemilikan perusahaan oleh pihak luar mempunyai kekuatan yang besar dalam mempengaruhi perusahaan melalui media massa berupa kritikan atau komentar yang semuanya dianggap suara publik atau masyarakat. Perusahaan dengan proporsi kepemilikan publik yang besar cenderung tepat waktu dalam pelaporan keuangannya (Hilmi dan Ali, 2008). Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini akan meneliti mengenai Pengaruh Karakteristik Komite Audit, Prediksi Kebangkrutan dan Kepemilikan Publik Terhadap Audit Report Lag. Penelitian akan dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 – 2014.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Penyajian yang wajar mensyaratkan penyajian secara jujur dampak dari transaksi, peristiwa lain dan kondisi sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, penghasilan dan beban yang diatur dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Penerapan SAK, dengan pengungkapan tambahan jika dibutuhkan, dianggap menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar (IAI, 2015). Entitas yang laporan keuangannya telah patuh terhadap SAK membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa kecuali tentang kepatuhan terhadap SAK dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas tidak dapat mendeskripsikan bahwa laporan keuangan telah patuh terhadap SAK kecuali laporan keuangan tersebut telah patuh terhadap seluruh persyaratan dalam SAK (IAI, 2015). Karakteristik kualitas laporan

keuangan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2015) nomor satu yaitu:

1. ***Dapat dipahami***

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai.

2. ***Relevan***

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengkoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu.

3. ***Keandalan***

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

4. ***Dapat dibandingkan***

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (tren) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda.

2.2. Teori Signaling

Menurut Permatasari (2012) dalam Dengah (2016), teori sinyal menyatakan bahwa informasi penting yang dikeluarkan perusahaan akan berpengaruh terhadap keputusan investasi pihak luar perusahaan. Informasi merupakan unsur penting bagi para pengguna laporan keuangan khususnya investor dan pelaku bisnis karena informasi dalam laporan keuangan menyajikan keterangan catatan atau gambaran keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan perusahaan dimasa yang akan datang. Informasi yang dipublikasikan merupakan kabar yang diberikan perusahaan sebagai sinyal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi (Andika (2015) dalam Dengah (2016)). Ada bermacam-macam informasi contohnya berupa pengumuman yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan, misalnya pengumuman yang berhubungan dengan laba (*earnings related announcements*) yang terdiri dari laporan tahunan awal, laporan tahunan detail, laporan interim awal, laporan interim detail, laporan perubahan-perubahan metode akuntansi, laporan auditor dan lain sebagainya. Sebagai contoh signaling theory menjelaskan hubungan opini auditor terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Dinita (2011) dalam Dengah (2016) menyatakan bahwa perusahaan yang

laporan keuangan auditan menerima pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) dari auditor merupakan signal bagi investor bahwa perusahaan cenderung akan lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya.

Ketepatan waktu penyajian laporan keuangan ke publik merupakan sinyal baik dari perusahaan yang mengindikasikan adanya informasi positif yang berguna bagi investor. Semakin lama audit report lag menyebabkan kurang bergunanya informasi dalam pengambilan keputusan karena informasi kehilangan sifat relevan (Andika, 2015). Dimana penyebaran informasi tidak merata sehingga ada sebagian pelaku pasar yang menerima informasi tepat waktu dan sebagian menerima informasi dengan terlambat atau bahkan tidak menerima informasi sama sekali. Kondisi seperti ini yaitu sebagian pelaku pasar mempunyai informasi dan sebagian tidak mempunyainya disebut dengan informasi yang tidak simetris (information asymmetric). Mereka yang mempunyai akses privat terhadap informasi dan menggunakannya untuk bertransaksi disebut insider trader. Perdagangan sekuritas yang menggunakan informasi privat ini disebut insider trading yang melanggar hukum karena merugikan pelaku pasar lainnya yang tidak atau belum mendapatkan informasi yang bersangkutan. Hal-hal inilah yang dapat terjadi jika audit report lag yang terjadi semakin lama. Melalui hal ini jelas terlihat betapa pentingnya ketepatan waktu dalam penyampaian informasi –dalam hal ini yaitu informasi tentang Laporan Keuangan.

2.3. Penyampaian Laporan Keuangan

Berikut ini ketentuan kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-346/BL/2011 tentang penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik:

1. Emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan berkala kepada Bapepam dan Lembaga Keuangan paling sedikit 2 (dua) eksemplar, satu diantaranya dalam bentuk asli, dan disertai dengan laporan dalam salinan elektronik (*soft copy*).
2. Laporan keuangan lengkap yang terdiri dari:
 - a. Laporan posisi keuangan (neraca)
 - b. Laporan laba rugi komprehensif
 - c. Laporan perubahan ekuitas
 - d. Laporan arus kas
 - e. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif, jika Emiten atau Perusahaan Publik menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif, membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya; dan
 - f. Catatan atas laporan keuangan
3. Bagi emiten atau perusahaan publik yang efeknya tercatat di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek di negara lain, maka laporan keuangan berkala yang disampaikan kepada Bapepam dan lembaga keuangan wajib memuat informasi yang sama dengan laporan keuangan berkala yang disampaikan kepada otoritas pasar modal di negara lain tersebut,

dan paling sedikit memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan.

4. Laporan keuangan tahunan wajib disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
5. Laporan keuangan tahunan wajib disertai dengan laporan akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan.
6. Laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Bapepam dan Lembaga Keuangan dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.
7. Dalam hal emiten atau perusahaan publik telah menyampaikan laporan tahunan sebelum batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan, maka emiten atau perusahaan publik tersebut tidak diwajibkan menyampaikan laporan keuangan tahunan secara tersendiri.
8. Pengumuman laporan keuangan tahunan wajib dilakukan dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Laporan keuangan tahunan yang diumumkan paling sedikit meliputi laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas, dan opini dari akuntan.
 - b. Bentuk dan isi laporan wajib sama dengan yang disajikan dalam laporan keuangan tahunan yang disampaikan kepada Bapepam dan lembaga keuangan; dan
 - c. Bukti pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada Bapepam dan Lembaga Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman.

Perusahaan tercatat yang terlambat menyampaikan laporan keuangan dikenakan sanksi sebagai berikut (Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-346/BL/2011):

1. Peringatan tertulis I, atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan sampai 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan.
2. Peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila mulai hari kalender ke-31 hingga hari kalender ke-60 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan.
3. Peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), apabila mulai hari kalender ke-61 hingga hari kalender ke-90 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan atau menyampaikan laporan keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 2 di atas.
4. Suspensi, apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan dan atau perusahaan tercatat telah menyampaikan laporan keuangan

namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 2 dan 3 di atas.

5. Sanksi suspensi perusahaan tercatat hanya akan dibuka apabila perusahaan tercatat telah menyerahkan laporan keuangan dan membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 2 dan 3 di atas.

2.4. Komite Audit

Komite audit menurut Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep- 643/BL/2012 adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas dan fungsinya. Perusahaan wajib memiliki komite audit. Komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar perusahaan. Berikut ini persyaratan keanggotaan komite audit menurut Kep- 643/BL/2012:

1. Anggota komite audit wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Anggota komite audit wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
3. Anggota komite audit wajib mematuhi kode etik komite audit yang ditetapkan oleh emiten atau perusahaan publik; bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
4. Anggota komite audit bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
5. Anggota komite audit wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.
6. Anggota komite audit bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
7. Anggota komite audit bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali komisaris independen.
8. Anggota komite audit tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik.
9. Dalam hal anggota komite audit memperoleh saham emiten atau perusahaan publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.

10. Anggota komite audit tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik tersebut.
11. Anggota komite audit tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik tersebut.

Dalam menjalankan fungsinya, komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut (Kep-643/BL/2012):

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan emiten atau perusahaan publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan emiten atau perusahaan publik.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan emiten atau perusahaan publik.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi, jika emiten atau perusahaan publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah dewan komisaris.
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan emiten atau perusahaan publik.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada dewan komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan emiten atau perusahaan publik.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi emiten atau perusahaan publik.

Dalam melaksanakan tugasnya komite audit mempunyai wewenang sebagai berikut (Kep-643/BL/2012):

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi emiten atau perusahaan public tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab komite audit.
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota komite audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh dewan komisaris. Komite audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat komite audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah

anggota. Keputusan rapat komite audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Setiap rapat komite audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

2.5. Prediksi Kebangkrutan

Kemampuan dalam memprediksi kebangkrutan akan memberikan keuntungan banyak pihak, terutama kreditur dan investor. Hanafi dan Halim (2009) dalam Siregar (2015) menyatakan bahwa analisis kebangkrutan dilakukan untuk memperoleh peringatan awal kebangkrutan (tanda-tanda awal kebangkrutan). Semakin awal tanda-tanda kebangkrutan tersebut, semakin baik bagi pihak manajemen karena pihak manajemen bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Pihak kreditur dan juga pihak pemegang saham bisa melakukan persiapan-persiapan untuk mengatasi berbagai kemungkinan yang buruk. Tanda-tanda kebangkrutan tersebut dalam hal ini dilihat dalam menggunakan data-data akuntansi.

Prediksi kebangkrutan perusahaan dapat digunakan rasio keuangan dan aliran kas perusahaan dengan beberapa model analisis keuangan yang dipergunakan untuk memprediksi atau menganalisis kondisi keuangan perusahaan (Siregar, 2015). Zmijewski menggunakan analisis rasio yang mengukur kinerja, *leverage*, dan likuiditas suatu perusahaan untuk model prediksinya. Zmijewski menggunakan probit analisis yang diterapkan pada 40 perusahaan yang telah bangkrut dan 800 perusahaan yang masih bertahan saat itu. Zmijewski telah mengukur akurasi modelnya sendiri, dan mendapatkan nilai akurasi 94,9% (Rahayu, Suwendra dan Yulianthini, 2016). Berikut model persamaan yang berhasil dikembangkan Zmijewski:

$$X = -4,3 - 4,5X_1 + 5,7X_2 - 0,004X_3$$

Keterangan:

X_1 = ROA (*return on asset*)

X_2 = *Leverage* (*debt ratio*)

X_3 = Likuiditas (*current ratio*)

Zmijewski (1984) dalam Wulandari, Nur dan Julita (2014) menyatakan bahwa perusahaan dianggap distress jika probabilitasnya lebih besar dari 0. Dengan kata lain, nilai X nya adalah 0. Maka dari itu, nilai *cutoff* yang berlaku dalam model ini adalah 0. Hal ini berarti, perusahaan yang nilai X nya lebih besar dari atau sama dengan 0 diprediksi mengalami kebangkrutan di masa depan. Sebaliknya, perusahaan yang nilai X nya kecil dari 0 diprediksi tidak akan mengalami kebangkrutan. Perusahaan yang diprediksi bangkrut cenderung akan menunda pelaporan keuangan karena auditor memerlukan waktu yang lebih lama dalam proses audit serta membutuhkan data tambahan untuk dapat menghasilkan opini yang sesuai dengan kondisi perusahaan tersebut. Semakin tinggi kemungkinan terjadinya kegagalan dan semakin buruk kondisi keuangan perusahaan akan membuat auditor meningkatkan risiko auditnya dan kemudian memperpanjang waktu *audit delay*. Panjangnya *audit delay* akan mempengaruhi penyampaian laporan keuangan perusahaan (Widyawati dan Anggraita, 2013).

2.6. Kepemilikan Publik

Kepemilikan publik adalah kepemilikan masyarakat umum (bukan institusi yang signifikan) terhadap saham perusahaan publik. Suharli dan Rachpriliani (2006) mengungkapkan bahwa struktur kepemilikan perusahaan dapat disebut juga sebagai struktur kepemilikan saham, yaitu suatu perbandingan antara jumlah saham yang dimiliki oleh pihak dalam atau manajemen perusahaan (*insider ownership's*) dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak luar (*outsiderownership's*) (Hilmi dan Ali, 2008).

Kepemilikan perusahaan oleh pihak luar mempunyai kekuatan yang besar dalam mempengaruhi perusahaan melalui media massa berupa kritikan atau komentar yang semuanya dianggap suara publik atau masyarakat. Adanya konsentrasi kepemilikan pihak luar menimbulkan pengaruh dari pihak luar sehingga mengubah pengelolaan perusahaan yang semula berjalan sesuai keinginan perusahaan itu sendiri menjadi memiliki keterbatasan. Dengan demikian, perusahaan dengan proporsi kepemilikan publik yang besar cenderung tepat waktu dalam pelaporan keuangannya (Hilmi dan Ali, 2008).

2.7. Hipotesis

2.7.1. Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap *Audit Report Lag*

Kemampuan komite audit identik dengan karakteristik yang harus dimiliki oleh komite audit. Oleh karena itu, perusahaan memperhatikan karakteristik yang dimiliki oleh setiap anggota komite auditnya (FCGI, 2002 dalam Maulina dan Sawarjuwono, 2014). Independensi dan kompetensi merupakan atribut penting bagi komite audit. Independensi menekankan pada komite audit yang harus bersikap netral dalam menjalankan perannya dan terutama fokus dalam menemukan solusi dari setiap perbedaan pendapat antara auditor eksternal dan manajemen. Komite audit yang memiliki kemampuan, keahlian serta pengalaman di bidang keuangan dapat membantu dan mendukung auditor eksternal ketika berdiskusi dan berselisih pendapat mengenai kebijakan akuntansi dan manajemen (Lawrence dan Parker, 2002 dalam Maulina dan Sawarjuwono, 2014). Faktor yang dirasakan berkaitan dengan karakteristik komite audit khususnya komunikasi dengan internal audit termasuk dengan mengadakan pertemuan rutin (Bromilow dan Berlin, 2005 dalam Maulina dan Sawarjuwono, 2014). Kompetensi komite audit menjadi hal yang sangat penting bagi suatu komite audit untuk dapat menjalankan tugasnya dan fungsinya dengan baik.

Berdasarkan peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-29/PM/2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ditentukan bahwa komite audit harus diketahui oleh komisaris independen, dan sekurang-kurangnya salah satu anggotanya memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi atau keuangan. Hal ini dibuat dengan pertimbangan bahwa tugas komite audit sangat erat berhubungan dengan masalah akuntansi dalam proses pelaporan keuangan perusahaan. Komite audit yang diketuai oleh seseorang yang memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi, akan meningkatkan kinerja dari komite audit. Hal tersebut dikarenakan tanpa pengetahuan yang memadai dalam bidang akuntansi, maka diduga peran yang dijalankannya

sebagai ketua komite audit akan tidak efektif (Sitorus, 2012). Sartika (2014) menyatakan bahwa semakin baik komite audit menjalankan perannya maka akan semakin singkat waktu penyampaian laporan keuangan, sebab jika komite audit berperan dengan baik maka temuan audit dalam laporan keuangan menjadi semakin sedikit sehingga mempersingkat pelaksanaan audit. Penyelesaian audit yang singkat akan menyebabkan semakin cepat penyampaian laporan keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ika dan Ghazali (2011) menunjukkan bahwa karakteristik komite audit akan mengurangi lama waktu penyampaian laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₁: Karakteristik komite audit berpengaruh terhadap audit report lag.

2.7.2. Pengaruh Prediksi Kebangkrutan Terhadap *Audit Report Lag*

Auditor memerlukan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan audit laporan keuangan apabila perusahaan diprediksi bangkrut. Hal ini disebabkan ketika perusahaan diprediksi bangkrut, cenderung akan terjadi penundaan pelaporan keuangan, karena auditor memerlukan waktu yang lebih lama dalam proses audit dan juga auditor memerlukan data tambahan yang diperlukan untuk dapat menghasilkan opini yang sesuai dengan kondisi perusahaan tersebut (Setyahadi, 2012). Proses audit yang lebih lama menyebabkan perusahaan lambat menyampaikan laporan keuangan.

Penelitian Schwartz dan Soo (1996) dalam Syafrudin (2004) menunjukkan bahwa perusahaan yang diprediksi bangkrut cenderung tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya dibanding perusahaan yang tidak diprediksi bangkrut. Perusahaan yang diprediksi bangkrut juga merupakan berita buruk (*bad news*) sehingga perusahaan dengan kondisi seperti ini cenderung tidak tepat waktu dalam pelaporan keuangannya. Penelitian yang dilakukan oleh Whittred dan Zimmer (1984), Ika dan Ghazali (2012), dan Aini dkk (2014) menunjukkan bahwa perusahaan yang mengalami masalah keuangan cenderung melaporkan laporan tahunan mereka lebih lama. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₂: Prediksi kebangkrutan berpengaruh terhadap audit report lag.

2.7.3. Pengaruh Kepemilikan Publik Terhadap *Audit Report Lag*

Kepemilikan publik adalah kepemilikan masyarakat umum (bukan institusi yang signifikan) terhadap saham perusahaan publik. Kepemilikan perusahaan oleh pihak luar mempunyai kekuatan besar dalam perusahaan. Kepemilikan perusahaan oleh pihak luar dapat mempengaruhi perusahaan melalui media masa baik berupa kritikan maupun komentar yang semuanya dianggap sebagai suara publik atau masyarakat (Hilmi dan Ali, 2008).

Para pemilik investasi akan mengindikasikan adanya *bad news* jika perusahaan terlambat mempublikasi laporan keuangan. Hal tersebut akan berpengaruh pada keputusan investasi yang

dilakukan investor di masa yang akan datang. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan dengan proporsi kepemilikan publik yang besar cenderung segera mempublikasikan laporan keuangan (Haryani dan Wiratmaja, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Hilmi dan Ali (2008) menunjukkan bahwa perusahaan dengan proporsi kepemilikan publik yang kecil cenderung untuk tepat waktu dalam pelaporan keuangannya. Perusahaan dengan proporsi kepemilikan publik yang besar cenderung untuk tidak tepat waktu dalam pelaporan keuangannya. Hasil penelitian Sulistyono (2010) menunjukkan bahwa kepemilikan publik berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Adanya konsentrasi kepemilikan publik maka pihak manajemen akan lebih mendapat tekanan dari pihak luar perusahaan atau *shareholder* untuk lebih tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan, karena pemegang saham dari pihak luar ingin dengan segera mengetahui informasi perkembangan dan kondisi perusahaan.

Hasil penelitian Saleh (2004), Suharli dan Rachpriliani (2006) serta Awalludin dan Sawitri (2012) menunjukkan bahwa kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₃: Kepemilikan publik berpengaruh terhadap audit report lag.

3. Metode Penelitian

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 – 2014. Kriteria sampel pada penelitian ini adalah:

- a. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 – 2014.
- b. Akhir tahun buku perusahaan adalah 31 Desember.
- c. Tersedia data tanggal penyampaian laporan keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Laporan keuangan tahunan perusahaan menyediakan data latar belakang pendidikan komite audit, independensi komite audit, piagam komite audit, jumlah komite audit dan jumlah rapat komite audit.
- e. Laporan keuangan disajikan dalam satuan rupiah.

Berdasarkan kriteria sampel penelitian, berikut ini proses pemilihan sampel yang telah dilakukan:

Tabel 1
Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut tahun 2010 - 2014	127
Akhir tahun buku perusahaan tidak 31 Desember	(0)
Tidak tersedia data tanggal penyampaian laporan keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan	(0)
Laporan keuangan tahunan perusahaan tidak menyediakan data latar belakang pendidikan komite audit, independensi komite audit, piagam komite audit, jumlah komite audit dan jumlah rapat komite audit	(77)
Laporan keuangan tidak disajikan dalam satuan rupiah	(11)
Sampel Penelitian	39
Total Data Observasi (39 perusahaan x 5 tahun)	195

3.2. Data dan Cara Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu laporan keuangan. Laporan tahunan perusahaan diperoleh dari website perusahaan dan website Bursa Efek Indonesia.

3.3. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu variabel dependen (Y) dan variabel independen (X).

a. Variabel dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *audit report lag*. *Audit report lag* adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku atau akhir tahun fiskal sampai diterbitkannya laporan keuangan auditan (Soetedjo, 2006 dalam Parwati dan Suhardjo, 2009).

b. Variabel independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Karakteristik komite audit, prediksi kebangkrutan dan kepemilikan publik.

1) Karakteristik Komite Audit

Karakteristik komite audit berarti kemampuan komite audit dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab pengawasannya (DeZoort *et al.*, 2002 dalam Maulina dan Sawarjuwono, 2014). Skor indeks karakteristik komite audit yang digunakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Komposisi Komite Audit

Komposisi komite audit terdiri dari independensi komite audit dan keahlian komite audit.

1. Independensi komite audit

Jika semua anggota komite audit merupakan pihak luar perusahaan diberi nilai

1. Jika salah satu atau lebih komite audit merupakan pihak dalam perusahaan maka diberi nilai 0.
 2. Keahlian komite audit
Jika paling sedikit 1 orang anggota komite audit berlatar belakang pendidikan dan berpengalaman dalam bidang akuntansi atau keuangan diberi nilai 1, sebaliknya 0.
- b) ***Kewenangan Komite Audit***
Kewenangan komite audit diukur dari ada tidaknya piagam komite audit. Jika terdapat piagam diberi nilai 1 dan jika tidak ada piagam diberi nilai 0.
- c) ***Sumber Daya Komite Audit***
Sumber daya komite audit diukur dari jumlah anggota komite audit. Jika jumlah anggota komite audit kurang dari 3 orang diberi nilai 0, dan jika jumlah anggota komite audit 3 orang atau lebih diberi nilai 1.
- d) ***Kerajinan Komite Audit***
Kerajinan komite audit diukur dari jumlah rapat komite audit. Jika anggota dewan komite audit melakukan rapat paling sedikit 4 kali dalam satu tahun diberi nilai 1, sebaliknya 0. Total skor tertinggi adalah 5. Indeks efektivitas komite audit diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Indeks Karakteristik komite audit} = \frac{\text{Total Skor efektivitas komite audit perusahaan}}{5}$$

2) ***Prediksi Kebangkrutan***

Prediksi kebangkrutan menunjukkan perusahaan yang bermasalah dalam keuangan yaitu perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban atau mengarah pada kebangkrutan (Eko, 2005 dalam Setyaningsih, 2008). Model prediksi kebangkrutan menggunakan model Zmijewski. Zmijewski (1984) menggunakan analisis rasio yang mengukur kondisi keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio *leverage* dan likuiditas untuk model prediksinya. Model yang dikembangkannya adalah sebagai berikut:

$$X = -4,3 - 4,5X_1 + 5,7X_2 - 0,004X_3$$

Keterangan:

X₁ = ROA (*return on asset*)

X₂ = *Leverage (debt ratio)*

X₃ = Likuiditas (*current ratio*)

Dari hasil perhitungan model Zmijewski diperoleh nilai X-Score yang dibagi dalam dua kategori, yaitu jika X-score bernilai negatif, maka perusahaan tersebut dalam kondisi yang sehat, sebaliknya jika X-score bernilai positif maka perusahaan tersebut dalam kondisi yang tidak sehat atau cenderung mengarah ke kebangkrutan.

3) *Kepemilikan Publik*

Kepemilikan publik adalah kepemilikan masyarakat umum (bukan institusi yang signifikan) terhadap saham perusahaan publik (Hilmi dan Ali, 2008). Rumus kepemilikan publik adalah sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan publik} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki publik}}{\text{Jumlah saham perusahaan}}$$

3.4. Model Regresi

Hipotesis Penelitian akan diuji dengan menggunakan regresi linier berganda dengan model regresi sebagai berikut:

$$\text{ARL} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{KA} + \alpha_2 \text{PREDIKSI} + \alpha_3 \text{PUBLIK} + e$$

Keterangan:

ARL	=	<i>Audit Report Lag</i>
α_0	=	intersep
α_{1-3}	=	koefisien regresi
KA	=	Efektivitas komite audit
PREDIKSI	=	Prediksi Kebangkrutan
PUBLIK	=	Kepemilikan publik
e	=	<i>Error</i>

4. Hasil Penelitian

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil analisis regresi berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Unstandardized Coefficients		t	Sig	Simpulan
	B	Std. Error			
(Constant)	102,361	2,644	38,710	0,000	
Efektivitas komite audit	-17,432	2,918	-5,974	0,000	H1 diterima
Prediksi Kebangkrutan	0,589	0,243	2,423	0,017	H2 diterima
Kepemilikan publik	2,696	2,543	1,060	0,291	H3 tidak diterima
F hitung	13,653				13,653
Sig.	0,000				0,000
<i>Adj R Square</i>	0,192				0,192

Berdasarkan hasil analisis regresi maka dapat dibuat suatu model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$ARL = 102,261 - 17,432 KA + 0,589 PREDIKSI + 2,696 PUBLIK$$

Keterangan:

ARL	=	<i>Audit Report Lag</i>
KA	=	Efektivitas Komite Audit
PREDIKSI	=	Prediksi kebangkrutan
PUBLIK	=	Kepemilikan Publik

Berikut ini adalah hasil pengujian hipotesis dengan regresi berganda. Uji F digunakan untuk menguji pengaruh karakteristik komite audit, prediksi kebangkrutan dan kepemilikan publik secara simultan terhadap *audit report lag*. Nilai probabilitas uji F sebesar 0,000. Nilai probabilitas uji F < 0,05 menunjukkan bahwa karakteristik komite audit, prediksi kebangkrutan dan kepemilikan publik secara simultan berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan variabel independen menjelaskan perubahan variabel dependen. Nilai *adjusted R Square* yang diperoleh dari hasil analisis regresi berganda adalah 0,192. Hal tersebut menunjukkan bahwa karakteristik komite audit, prediksi kebangkrutan dan kepemilikan publik mampu menjelaskan perubahan *audit report lag* sebesar 19,2% sedangkan sisanya 80,8% dijelaskan oleh variabel lain. Berikut ini merupakan penjelasan pengujian hipotesis yang telah dilakukan:

1. Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap *Audit Report Lag*

Tabel 2 menunjukkan nilai koefisien regresi variabel karakteristik komite audit sebesar -17,432 dan nilai probabilitas sebesar 0,000, sehingga dapat disimpullkan bahwa karakteristik komite audit berpengaruh terhadap *audit report lag*. Nilai koefisien regresi negatif menunjukkan bahwa ketika anggota komite audit berasal dari luar perusahaan, anggota komite audit berlatar belakang pendidikan dan berpengalaman dalam bidang akuntansi atau keuangan, memiliki piagam komite audit, jumlah anggota komite audit 3 orang dan melakukan rapat lebih dari 4 kali dalam satu tahun maka *audit report lag* lebih pendek.

Tugas komite audit sangat erat berhubungan dengan masalah akuntansi dalam proses pelaporan keuangan perusahaan. Oleh sebab itu, komite audit yang diketuai oleh seseorang yang memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi, akan meningkatkan kinerja dari komite audit. Karena tanpa pengetahuan yang memadai dalam bidang akuntansi, maka diduga peran yang dijalankannya sebagai ketua komite audit akan tidak efektif (Sitorus, 2012).

Sartika (2014) menyatakan bahwa semakin baik komite audit menjalankan perannya maka akan semakin singkat waktu penyampaian laporan keuangan, sebab jika komite audit berperan dengan baik maka temuan dalam laporan keuangan menjadi semakin

sedikit sehingga mempersingkat pelaksanaan audit. Penyelesaian audit yang singkat akan menyebabkan semakin cepat penyampaian laporan keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Ika dan Ghazali (2011) yang menunjukkan bahwa karakteristik komite audit akan mengurangi waktu penyampaian laporan keuangan.

2. Pengaruh Prediksi Kebangkrutan Terhadap Audit Report Lag

Tabel 2 menunjukkan nilai koefisien regresi variabel prediksi kebangkrutan sebesar 0,589 dan nilai probabilitas sebesar 0,017 sehingga dapat disimpulkan bahwa prediksi kebangkrutan berpengaruh terhadap *audit report lag*. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa saat perusahaan tidak sehat maka waktu penyampaian laporan keuangan lebih lama.

Auditor memerlukan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan audit laporan keuangan apabila perusahaan diprediksi bangkrut. Hal ini disebabkan ketika perusahaan diprediksi bangkrut, cenderung akan terjadi penundaan pelaporan keuangan, karena auditor memerlukan waktu yang lebih lama dalam proses audit dan juga auditor memerlukan data tambahan yang diperlukan untuk dapat menghasilkan opini yang sesuai dengan kondisi perusahaan tersebut (Setyahadi, 2012). Proses audit yang lebih lama menyebabkan perusahaan lambat menyampaikan laporan keuangan.

Penelitian Schwartz dan Soo (1996) dalam Syafrudin (2004) menunjukkan bahwa perusahaan yang diprediksi bangkrut cenderung tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya dibanding perusahaan yang tidak diprediksi bangkrut. Perusahaan yang diprediksi bangkrut merupakan berita buruk (*bad news*) sehingga perusahaan dengan kondisi seperti ini cenderung tidak tepat waktu dalam pelaporan keuangannya. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Ika dan Ghazali (2012) serta Aini dkk (2014) yang menunjukkan bahwa perusahaan yang diprediksi bangkrut cenderung melaporkan laporan tahunan mereka lebih lama.

3. Pengaruh Kepemilikan Publik Terhadap Audit Report Lag

Tabel 2 menunjukkan nilai koefisien regresi variabel kepemilikan publik sebesar 2,696 dan nilai probabilitas sebesar 0,291 sehingga kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Hal ini dikarenakan kepemilikan saham publik kurang dari 50% yaitu sekitar 27,18%. Kecilnya presentase kepemilikan pihak luar ini akan mempengaruhi hak suara yang dimilikinya. Kondisi ini mengakibatkan hak suara (kewenangan) terhadap perusahaan kecil juga, sehingga peranannya tidak terlalu besar dalam menentukan kebijakan perusahaan terutama yang menyangkut segi pelaporan keuangan (Awaludin dan Sawitri, 2012). PSAK 4 menyatakan bahwa kontrol pemegang saham dianggap efektif apabila lebih dari 50% hak suara.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Saleh (2004), Suharli dan Rachpriliani (2006) serta Awalludin dan Sawitri (2012) yang menunjukkan bahwa

kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Karakteristik komite audit berpengaruh terhadap *audit report lag*. Ketika anggota komite audit berasal dari luar perusahaan, anggota komite audit berlatar belakang pendidikan dan berpengalaman dalam bidang akuntansi atau keuangan, memiliki piagam komite audit, jumlah anggota komite audit 3 orang dan melakukan rapat lebih dari 4 kali dalam satu tahun maka *audit report lag* lebih pendek.
2. Prediksi kebangkrutan berpengaruh terhadap *audit report lag*. Perusahaan diprediksi bangkrut maka waktu penyampaian laporan keuangan lebih lama.
3. Kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

6. Implikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik komite audit dan prediksi kebangkrutan berpengaruh terhadap *audit report lag*. Berdasarkan hal tersebut maka pihak perusahaan diharapkan meningkatkan kinerja komite audit sebab dengan adanya kinerja komite audit yang baik maka perusahaan cenderung menyampaikan laporan keuangan tepat waktu. Selain itu peningkatan kinerja harus selalu dilakukan guna menghindari terjadinya kebangkrutan perusahaan. Perusahaan yang tidak diprediksi bangkrut akan menyampaikan laporan keuangan tepat waktu.

7. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu penelitian ini tidak menggunakan indikator tanggung jawab komite audit dan pengungkapan sukarela komite audit dalam pengukuran variabel karakteristik komite audit. Hal ini dikarenakan tidak ada pengukuran yang jelas mengenai penjelasan secara detail, singkat atau tidak mengungkapkan tanggung jawab komite audit.

Daftar Pustaka

- Aini, Nurul, Lili Sugeng Wiyantoro dan Helmi Yazid. (2014). *Keterkaitan antara Keefektifan Komite Audit dan Profitabilitas Perusahaan dengan Financial Reporting Lead Time (Studi Empiris pada Perusahaan di Banten yang Listing di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2012)*. Simposium Nasional Akuntansi 17, Mataram.
- Awaludin, Vita Magdalena dan Peni Sawitri. (2012). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma.

- Brian Ivan dan Dwi Martani. (2014). Analisis Pengaruh Penghindaran Pajak dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Waktu Pengumuman Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi 17*, Mataram.
- Dengah, Maria Stephanie. (2016). Pengaruh Karakteristik Komite Audit Dan Opini Auditor Terhadap *Audit Report Lag* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2012-2014. Skripsi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Haryani, Jumratul dan I Dewa Nyoman Wiratmaja. (2014). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komite Audit, Penerapan International Financial Reporting Standards dan Kepemilikan Publik pada Audit Delay. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Volume 6. Nomor 1*.
- Hilmi, Utari dan Syaiful Ali. (2008). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan-perusahaan yang Terdaftar di BEJ Periode 2004-2006). *Simposium Nasional Akuntansi 11*.
- Ika, Siti Rochmah dan Nazli A. Mohd Ghazali. (2011). Audit Committee Effectiveness and Timeliness of Reporting: Indonesian Evidence. *Managerial Auditing Journal*. Vol. 27. No. 4
- Kadir, Abdul. (2011). Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*. Volume 12. Nomor 1.
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-346/BL/2011
- Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004
- Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-643/BL/2012
- Lianto, Novice dan Budi Hartono Kusuma. (2010). Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap *Audit Report Lag*. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. Volume 12. Nomor 2.
- Maulina, Febi Citra dan Tjiptohadi Sawarjuwono. (2014). Efektivitas Komite Audit dalam Sudut Pandar Auditor Internal pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. *Simposium Nasional Akuntansi 17*, Mataram.
- Midansih, Ken dan Wibowo. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2005 – 2007. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik*. Volume 6. Nomor 1, Halaman 55 – 70.
- Parwati, Lina Anggraeny dan Yohanes Suhardjo. (2009). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Audit Report Lag* (ARL). *Solusi* Volume 8, Nomor 3, Halaman 29 – 42.
- Purwanti, Atiek Sri. (2006). Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Publik yang Tercatat di BEJ. Tesis. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Saleh. Rachmat. (2004). Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta. *Simposium Nasional Akuntansi 7*.
- Sartika, Riyan. (2014). Pengaruh Peran Komite Audit, Reputasi KAP dan Ukuran Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Audit (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan dan Perusahaan Asuransi yang Terdaftar di BEI). *Artikel Skripsi*. Universitas Negeri Padang.

- Setyahadi, R. Rulick. (2012). Pengaruh Probabilitas Kebangkrutan pada Audit Delay. *Tesis*. Universitas Udaya, Denpasar.
- Setyaningsih, Hesty. (2008). Pengaruh Tingkat Kesulitan Keuangan Perusahaan Terhadap Konservatisme Akuntansi. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*. Volume 9. Nomor 1. Halaman 91 – 107.
- Siregar, Ifan Wicaksana. (2015). Pengaruh Prediksi Kebangkrutan Model Altman Terhadap Opini Audit Going Concern. http://repository.fe.unjani.ac.id/pdf/140-146_PENGARUH_PREDIKSI_KEBANGKRUTAN_MODEL_ALTMAN.pdf. Diakses Tanggal 19 April 2016.
- Sitorus, Irma Julian. (2012). Analisis Peran Komite Audit yang Efektif dan Independensi Dewan Komisaris (Studi pada Badan Usaha Milik Negara yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia). *Seminar Nasional Akuntansi dan Bisnis*, Bandung.
- Suharli, Michell dan Awaliawati Rachpriliani. (2006). Studi Empiris Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Ketepatanwaktu Pelaporan Keuangan. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. Volume 8, Nomor 1, Halaman 34 – 55.
- Sulistyo, Wahyu Adhy Noor. (2010). Analisis Faktor-Faktor Faktor yang Berpengaruh Terhadap Ketepatanwaktu Penyampaian Laporan Keuangan pada Perusahaan yang *Listing* di Bursa Efek Indonesia Periode 2006 – 2008. *Skripsi*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Syafrudin, M. 2004. Pengaruh Ketidaktepatwaktuan Penyampaian Laporan Keuangan pada *Earning Response Coefficient*: Studi di Bursa Efek Jakarta. *Simposium Nasional Akuntansi VII Ikatan Akuntan Indonesia*. Hal: 754-776.
- Widyawati, Asri Adika dan Viska Anggraita. (2013). Pengaruh Konvergensi, Kompleksitas Akuntansi, dan Probabilitas Kebangkrutan Terhadap *Timeliness* dan Manajemen Laba. *JAAI*. Volume 17. Nomor 2.